



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI
JAWA TENGAH**



2020

Jateng
gayeng



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi Tahun 2020. LKjIP SKPD Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata Biro Organisasi dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 tahun Anggaran. Proses kinerja Biro Organisasi telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Biro Organisasi.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.



Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, 22 Februari 2021

Kepala Biro Organisasi



Dr. Ir. IHWAN SUDRAJAT, MM
Pembina Utama Madya
NIP.196411041989031013

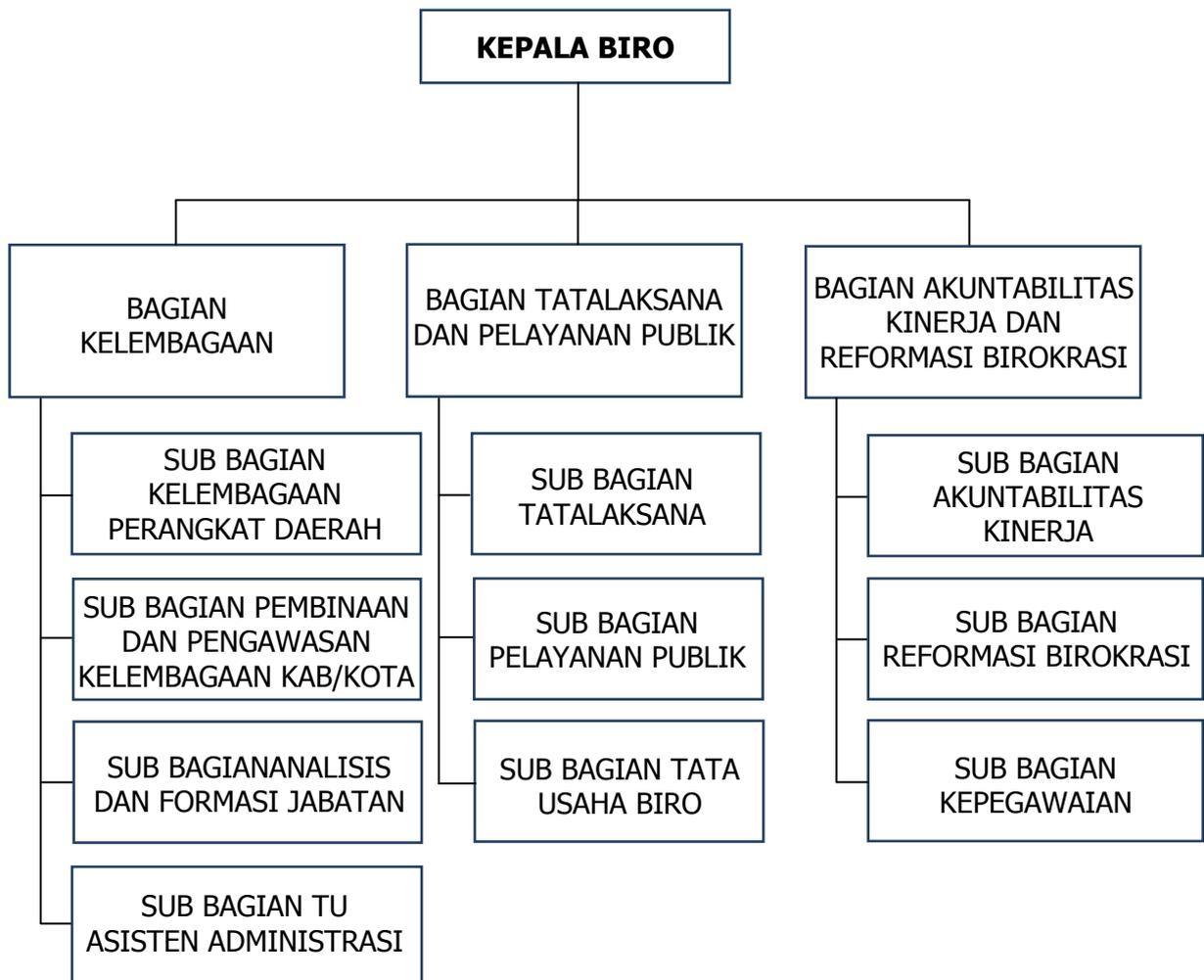


BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 9 Biro, satu diantaranya adalah Biro Organisasi. Adapun struktur organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut :

Struktur Organisasi Biro Organisasi
Setda Provinsi Jawa Tengah





Tugas Biro Organisasi adalah melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
2. Pengoordinasian pelaksanaan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi;
5. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.



Biro Organisasi mempunyai tugas dan fungsi yang dibagi 3 bagian sebagai berikut :

1. Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Kelembagaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan Perangkat Daerah, pembinaan dan pengawasan kelembagaan Kabupaten/Kota, analisis dan formasi jabatan. Dan mempunyai fungsi, yaitu :
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan perangkat daerah;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pembinaan dan pengawasan kelembagaan Kabupaten/Kota;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang analisis dan formasi jabatan;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Kelembagaan;



- e. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup Asisten Administrasi di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Pelayanan Publik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang tata laksana, pelayanan publik dan tata usaha Biro. Dan mempunyai fungsi, yaitu :
- a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Tata laksana;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pelayanan publik;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Pelayanan Publik,



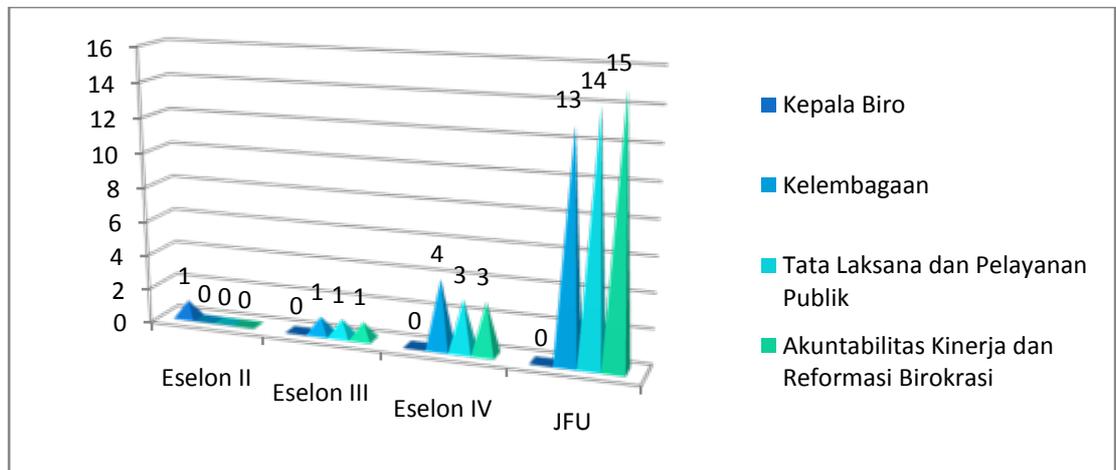
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup biro di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan sistem informasi dan rumah tangga biro; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi dan kepegawaian. Dan mempunyai fungsi, yaitu :
- a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang akuntabilitas kinerja;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang reformasi birokrasi;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi;



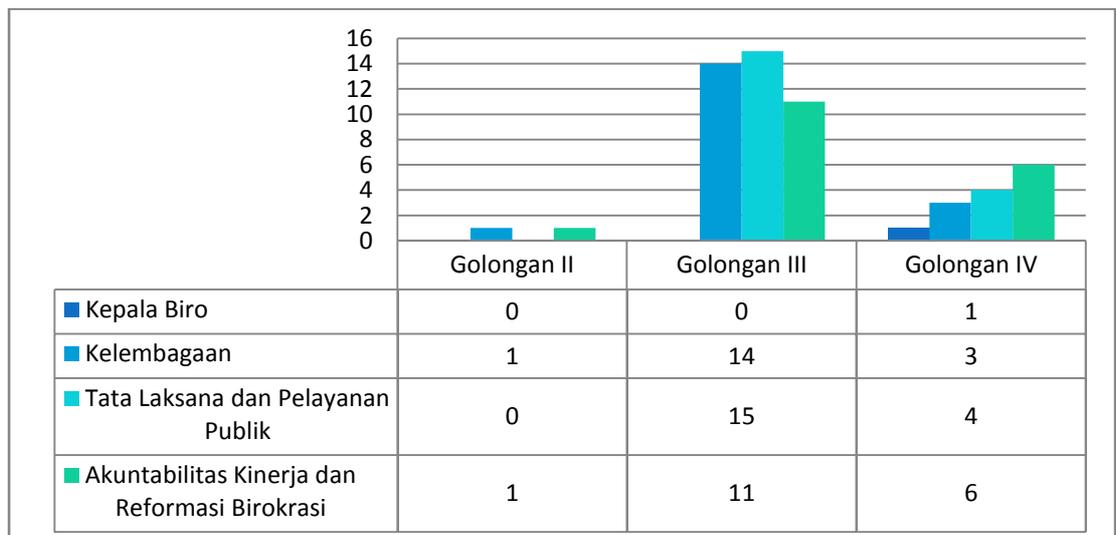
- d. penyiapan bahan pengoordinasian, pengelolaan dan pelayanan administrasi secara terpadu serta pelaporan di bidang kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut :

1. Menurut Jabatan/Eselon/JFU:

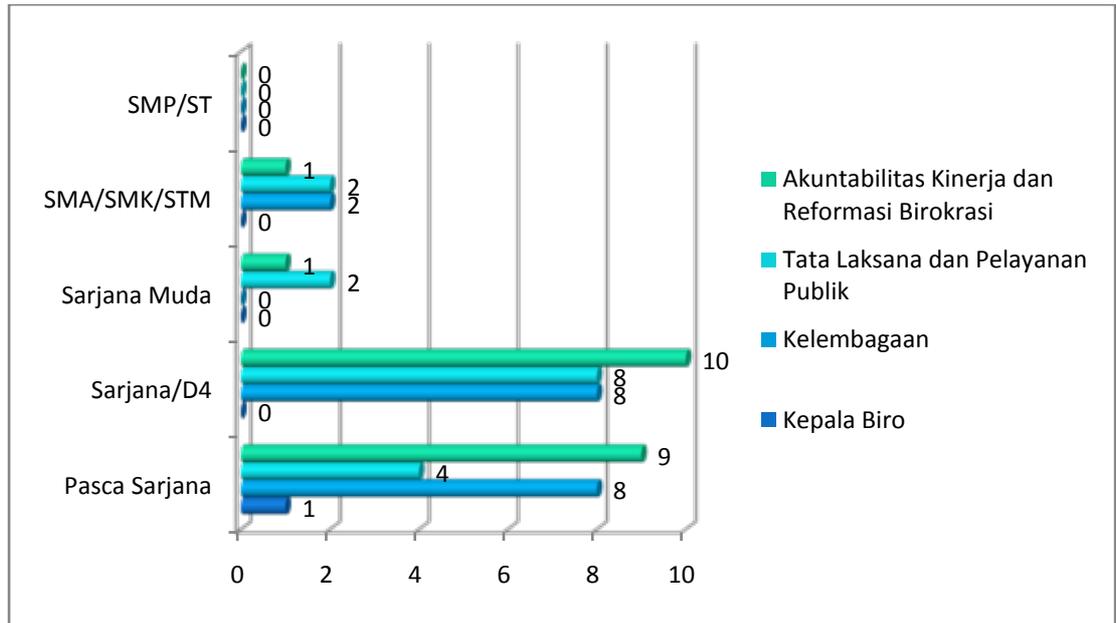


2. Menurut Golongan :





3. Menurut Tingkat Pendidikan:



4. Menurut jenis kelamin:

Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepala Biro	1	-	1
Bagian Kelembagaan	9	9	18
Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik	6	10	16
Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12	9	21
Total			56

Sedangkan untuk mendukung tupoksi tersebut Biro Organisasi memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

No Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
1	Kendaraan roda 4		5 Unit	Baik
2	Kendaraan roda 2		3 Unit	Baik
3	Komputer		50 Unit	Baik
4	Laptop		5 Unit	Baik
5	LCD/in focus		3 Unit	Baik
6	Printer		30 Unit	Baik
7	Mesin Ketik Manual		11 Unit	Baik



B. Permasalahan Utama yang dihadapi Biro Organisasi.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Biro Organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi adalah tingginya dinamika perubahan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan dalam kebijakan Kelembagaan, Kepegawaian, akuntabilitas kinerja, serta tuntutan masyarakat atas pelayanan publik semakin besar mengikuti perkembangan jaman sehingga perlu kinerja pemerintah yang optimal dalam menyusun kebijakan bidang tersebut.

C. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Istansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya LKjIP yang diawali dengan uraian singkat tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dimuat pula tentang landasan hukum penyusunan LKjIP dan aspek strategis / isu strategis , keterkaitan dengan Renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah .

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan (merupakan penjabaran Visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah dilengkapi dengan rencana kinerja Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini memuat penjelasan prioritas proram dan kegiatan beserta analisis capaian kinerja Kantor serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).

BAB IV . PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran .



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis.

Berdasarkan RPJMD 2018 – 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, Renstra adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018 – 2023.

Biro Organisasi yang merupakan unit kerja dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu Renstra Biro Organisasi menjadi satu kesatuan dalam Renstra Setda Tahun 2018 – 2023.

1. Visi

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah:

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

"Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapus!"

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013-2018. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

a. Sejahtera

Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman



dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

b. Berdikari

Berdikari merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumberdaya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan.

Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari dilandasi semangat dan nilai utama ***Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi***. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

2. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

- 1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia**



Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik.

2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota

Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*". Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas



dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.



3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar. Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu.



4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

3. Tujuan

Meningkatkan efektivitas manajemen Pemerintah Daerah.

4. Sasaran

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu :

- a) Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah
- b) Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan



Dalam rangka memujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiapsasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Biro Organisasi dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan
Biro Organisasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1) Nilai kematangan organisasi daerah	19	22	25	28	31
			2) presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	52,10	64,32	76,48	88,64	100
			3) Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	73	78	82	87	92
			4) Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	25	40	54	70	85

Kinerja Sasaran secara keseluruhan ada dalam kewenangan Sekretariat Daerah sebagai 1 (satu) Perangkat Daerah. Biro Organisasi berkontribusi pada target kinerja indikator sasaran yang menjadi batas kewenangannya sesuai dengan tabel tersebut di atas.

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini



seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2020. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Biro Organisasi, yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah. Rencana Kinerja Tahunan Biro Organisasi pada Tahun 2020 dituangkan ke dalam 2 (dua) program, yaitu : Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah dan Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah; kemudian dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 6.920.000.000 kemudian terjadi refocusing anggaran menjadi Rp. 1.666.838.000,- (Satu milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan komposisi : Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 1.408.336.000,- dan anggaran pendukung tidak langsung (administrasi perkantoran) sebesar Rp. 258.502.000,-. Masing-masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagaidasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.



4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Biro Organisasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, secara lengkap **tercantum pada Lampiran 1.**



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan Progres Kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ini disusun guna mengukur atau untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program, kebijakan, sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis 2018 – 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ini menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Selain pencapaian setiap sasaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga menyajikan capaian kinerja kegiatan tahun 2020. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan/proyek meliputi Indikator masukan (*Input*), keluaran (*Output*), hasil (*Outcome*), manfaat (Benefit) dan dampak (*Impact*). Akan tetapi untuk sementara ini, dari Lima indikator hanya digunakan Tiga indikator yakni



hanya sampai indikator hasil (Outcome) dengan argumen kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Benefit dan Impact belum dapat dilakukan mengingat pengukuran yang relatif.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2020, Biro Organisasi telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian kinerja indikator sasaran yang diampu. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan Rencana Strategis Biro Organisasi, terdapat satu sasaran strategis Sekretariat Daerah yang harus diwujudkan oleh Biro Organisasi pada tahun 2020, yaitu :

Sasaran Strategis :

Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



Tolok ukur capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Biro Organisasi terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu :

1. Nilai kematangan organisasi daerah
2. Persentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik
3. Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B
4. Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel 3.2.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Real. 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2020)
			Target	Real.	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai kematangan organisasi daerah		29	34,38	118,55	31	110,90
2.	Persentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik		70	93,22	133,17	100	93,22
3.	Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B		78	83,67	107,26	92	90,94
4.	Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya		50	73	146	85	85,88
Persentase Capaian Sasaran Strategis					126,24%		95.23%



Dari tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran tercapai sebesar **126,24%** atau **kategori sangat Baik**. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar **95,23%** dari target akhir Tahun **Renstra 2023**. Indikator kinerja sasaran ini merupakan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra 2018-2023 dan belum menjadi indikator dalam Renstra lama sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Secara lebih rinci pencapaian sasaran dari indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Biro Organisasi adalah sebagaimana dijelaskan denganuraian berikut :

a. Capaian Indikator Sasaran Nilai Kematangan Perangkat.

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2020	Realisasi 2020	Target Akhir Renstra	% Capaian sd. Th 2020 Atas Target Renstra
Nilai Kematangan Organisasi Daerah	29	34,38	31	110,90

Indikator Sasaran Nilai Kematangan Perangkat Daerah Target awal Nilai 22 terjadi perubahan target menjadi Nilai 29 tercapai nilai 34,38 atau tercapai sebesar 118,55% dari target ditetapkan. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target Program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu :

1) Indikator Program persentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15 dengan target 97,56 %. pencapaian target sebesar 100% atau dari 48 OPD yang difasilitasi 48 OPD, seluruh Perangkat Daerah telah memperoleh nilai kematangan diatas 15.

Upaya pencapaian dengan target tersebut dengan kegiatan Pengembangan efektivitas kelembagaan Perangkat Daerah. target kinerja kegiatan jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan. Target 48 OPD dan tercapai seluruhnya atau tercapai 100%.

Dengan Adanya pembahasan konsep rancangan peraturan gubernur tentang SOTK rumah sakit daerah kami mengundang perwakilan 7 Rumah Sakit Umum Provinsi Jawa Tengah.



Pengukuran kematangan dilaksanakan berdasarkan amanat Permendagri 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. OPD dengan nilai kematangan yang masuk terbaik dan runner up mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah. dilaksanakan pada 11 Desember 2019. Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah direncanakan untuk menjadi Pilot Project Pengukuran Kematangan Oleh Kemendagri.

Kegiatan ini di dukung dengan dana sebesar Rp.182.877.000,- dengan realisasi anggaran Rp.182.049.800,- atau terserap 99,54 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

- 2) Indikator Program persentase Kab/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi daerah minimal 15 dengan target 51,43% Kab/Kota. Pada Tahun 2020 tercapai sebesar 51,43% atau sebanyak 18 Kab/Kota. Kegiatan penunjang target kinerja ini adalah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kab/Kota. Kinerja dari kegiatan ini merupakan mandatory dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 ttg Pemerintah Daerah dan PP 18 Tahun 2016 tentang



Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa gubernur adalah wakil Pemerintah Pusat di daerah terkait Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota, tugas tugas ini meliputi

fasilitasi atas pembentukan Perda Perbup dan Perwali tentang SOTK

Perangkat Daerah Kab/Kota. Anggaran pendukung kegiatan sebesar Rp.185.921.000 dengan realisasi keuangan Rp.184.442.350,- atau secara prinsip perencanaan penganggaran sudah terserap adapun sisa adalah efisien perjalanan dinas.

- 3) Indikator Program Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB, dengan target kinerja Tahun 2020 sebesar 84% terealisasi 84% atau 100% dari target direncanakan. Upaya pencapaian target indikator program tersebut dengan melaksanakan kegiatan



Pembinaan Analisis jabatan dengan target kinerja kegiatan Tahun 2020 sebanyak 48 OPD dan 35 Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi anjab. Dalam Tahun 2020

dilaksanakan aktivitas yang menjadi unggulan diantaranya penyusunan standar kompetensi jabatan yang digunakan untuk penataan, pengangkatan dalam jabatan. hasil dari aktivitas tersebut adalah Standar Kompetensi Jabatan (SKJ). Dokumen tersebut digunakan dalam pemetaan ASN berdasarkan kompetensi jabatan dan sebagai bahan penyediaan diklat bagi ASN, Open biding pejabat JPT.

Anggaran digunakan mendukung kegiatan tersebut adalah Rp.162.789.000,- dengan realisasi sebesar Rp.162.606.300,- atau realisasi anggaran sebesar 99,88% dengan demikian penggunaan anggaran telah sesuai dengan perencanaan.

b. Indikator Sasaran Persentase UPP yang memperoleh Nilai IKM baik.

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2020	Realisasi 2020	Target Akhir Renstra	Capaian sd. Th 2020 Atas Target Renstra
presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	70	93.22	100	93,22

Indikator Sasaran Persentase UPP yang memperoleh Nilai IKM baik target semula sebesar 64,32% kemudian terjari perubahan target menjadi 70% dengan capaian 93,22% atau tercapai sebesar 133,17% dari target. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target Program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu :

- 1) Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan dengan target kinerja tahun 2020 sebesar 36,73% tercapai 36,48% atau terelisasi sebesar 99,31% dari Target ditetapkan.



Kegiatan guna mendukung capaian kinerja ini adalah Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik. target kinerja untuk indikator kegiatan Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi standar pelayanan tercapai 100%

atau seluruh kab/kota, sedangkan target kinerja fasilitasi 100 UPP tercapai 100% atau 100 UPP difasilitasi.

Anggaran pendukung kegiatan ini sebesar Rp.403.581.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.402.612.100 atau 99,75% sisa anggaran berasal dari negosiasi harga pembelian pengadaan ATK , belanja jasa, cetak dan makan minum dan pengintegrasian kegiatan.

2) Indikator Program Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ke tatalaksanaan dengan target kinerja 67,99% tercapai 68,95% atau terealisasi 101,41% dari target ditetapkan. Kegiatan guna mendukung



target kinerja program ini adalah kegiatan Pengembangan tatalaksana Pemerintah dengan indikator kegiatan Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan tercapai 100%

atau seluruh kab/kota, sedangkan untuk indikator kinerja Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan dengan target kinerja 240 UPP dan capaian kinerja 222 UPP atau tercapai 92,5% dari target. Anggaran pendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.174.277.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.171.602.144,- atau 98,46% efisiensi penggunaan dana sebagian besar berasal dari negosiasi sewa gedung dan pengurangan narasumber/ instruktur.

c. Indikator Persentase Pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B.

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2020	Realisasi 2020	Target Akhir Renstra	Capaian sd. Th 2020 Atas Target Renstra
Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	78	83,67	92	90,94

Indikator Persentase Pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah baik (B keatas) target 2020 yaitu 78% tercapai 83,67% atau tercapai sebesar 107,26% dari target. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target Program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu :

- 1) Indikator Program Persentase OPD yang Nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas) dengan target kinerja 100% tercapai 100% atau terealisasi 100% dari target ditetapkan. Kegiatan guna mendukung target kinerja program ini adalah kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan Zona Integritas dengan target kinerja Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP dan pembinaan pembangunan ZI tercapai 100% atau seluruh kab/kota, sedangkan target kinerja Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan

Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.



Sistem AKIP dan pembinaan pembangunan ZI tercapai 100% atau seluruh Perangkat Daerah.

Aktivitas unggulan kegiatan ini pada tahun 2020 adalah fasilitasi SAKIP Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat A, selain itu dalam

Pembangunan Zona Integritas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diantaranya Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I dan DPMPTSP mendapat predikat WBK dan RSUD Dr. Moewardi dan RSUD Tugurejo mendapat predikat WBBM. Anggaran pendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.163.585.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.161.338.280,- efisiensi penggunaan dana sebesar Rp.2.246.720,- sebagian besar berasal dari perjalanan dinas dan selisih negosiasi belanja barang jasa.

- 2) Indikator Program Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat dengan target kinerja 85% tercapai 85,71% atau terealisasi 100.83% dari target ditetapkan. Kegiatan dalam rangka mendukung target kinerja program ini adalah Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan indikator kinerja

Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah, Biro Organisasi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Penyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dengan narasumber LAN RI dan dosen Fisip UNDIP.



Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB dengan target kinerja 48 OPD dan tercapai 100% atau seluruh OPD terfasilitasi.

Anggaran pendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.80.669.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.76.803.383,- (95,20%).

Aktivitas unggulan kegiatan ini pada tahun 2020 adalah Fasilitasi/pendampingan Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, untuk mendorong peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 76,99 (BB), mengalami kenaikan sebesar 1,78 poin dibandingkan tahun sebelumnya (2018) yang memperoleh indeks sebesar 74,75 (BB). Pada tahun 2020, seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan PMPRB, dan nilai tertinggi di peroleh oleh RSUD Prof. Margono Soekarjo dengan nilai 36,30. Nilai PMPRB Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 adalah

84,93 (A), sedangkan Indeks RB tahun 2020 belum dirilis oleh Kementerian PAN-RB meskipun sudah dilakukan evaluasi.

Aktivitas unggulan lainnya adalah Fasilitasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 41 Perangkat Daerah telah menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang disesuaikan dengan sasaran dan area reformasi birokrasi yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah.

d. Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Indeks RBnya

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2020	Realisasi 2020	Target Akhir Renstra	Capaian sd. Th 2020 Atas Target Renstra
Persentase kabupaten/kota yang meningkat indeks RB nya	50	73	85	85,88

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat indeks RB nya memiliki target semula 40% kemudian mengalami perubahan target menjadi 50% tercapai 73% atau tercapai sebesar 146% dari target. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target Program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu :

1) Indikator program Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat dengan target

Fasilitasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi bagi 21 Kab/Kota Yang Akan Melaksanakan Pilkada Tahun 2020 (Tahap 3) oleh Biro Organisasi Setda Prov.Jateng.Acara diikuti oleh pejabat struktural dari Bagian Organisasi dan Bappeda Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kab Boyolali, Kab Klaten, Kab Sragen, Kab Wonogiri dan Kab Sukoharjo.



kinerja 45% dan tercapai 45,17% atau tercapai sebesar 100,37% dari target. Kegiatan dalam rangka mendukung target kinerja program ini adalah Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi Kab/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB dengan target

kinerja 35 Kab/Kota dan tercapai 100% atau seluruh Kab/Kota terfasilitasi. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab/Kota pada tahun 2019, terdapat 24 Kabupaten/Kota dengan Indeks RB berpredikat B (Baik), 11 Kabupaten/Kota berpredikat CC (Cukup). Pada tahun 2020, seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah melaksanakan PMPRB online secara tuntas, dan sudah dilakukan evaluasi oleh Kementerian PAN-RB, akan tetapi hasilnya belum dirilis. Subbag Reformasi Birokrasi juga melaksanakan Pendampingan atau Fasilitasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Bagi 21 Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2020, yang melibatkan pejabat struktural di Bagian Organisasi dan Bappeda Kabupaten/Kota.

Anggaran pendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.54.637.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.53.526.954,- (97,47 %).

- e. Kegiatan guna mendukung target kinerja program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah adalah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal



dengan target kinerja 40 ASN yang mengikuti Diklat / Workshop / Bintek / Seminar tercapai sebanyak 16 ASN atau 40%. Tidak tercapainya target kinerja dikarenakan adanya refocusing anggaran

sebesar 84% dan adanya pembatasan pelaksanaan diklat. Selain itu, program ini didukung juga oleh Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target kinerja Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya dan mencapai target 100%.



Anggaran pendukung kedua kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.258.502.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.254.697.800,- Sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp.3.804.200,- dalam hal efisiensi penggunaan dana sebagian besar dari sisa perjalanan dinas serta sisa belanja cetak.

B. Realisasi Anggaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2020, anggaran pendukung sebesar Rp 1.666.838.000,- (Satu milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari 100% APBD Provinsi Jawa Tengah dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai Rp. 0,-
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.666.838.000,-
3. Belanja Modal sebesar Rp. 0,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Rp. 1.408.336.000,-	Rp.1.394.981.311,-	99,05%
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 258.502.000,-	Rp. 254.697.800,-	98,52%
JUMLAH TOTAL		Rp.1.666.838.000,-	Rp.1.649.679.111,-	98,97%



Dilihat dari sisi penyerapan anggaran pada Tahun 2020 terdapat efisiensi sebesar Rp. 17.158.889,- atau 1,03%, dimana pagu yang ditetapkan sebesar Rp. 1.666.838.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.649.679.111,-. Dalam menunjang pencapaian sasaran tahun 2020 pelaksanaan Program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan sehingga dengan tercapainya indikator sasaran maka sisa anggaran dapat dikategorikann sebagai efisiensi karena berasal dari selisih atas negosiasi belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas yang dioptomalkan.



BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.

Biro Organisasi adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten mempunyai tugas pokok dan fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tatalaksana, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah telah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan **dengan kategori Sangat Baik**. Hal ini didukung dengan data sebagai berikut :

Capaian kinerja **Sasaran 1** Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tercapai sebesar **126,24%** atau **kategori Sangat Baik**.

B. Permasalahan/Kendala.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 antara lain :

1. Dinamika kebijakan tentang kelembagaan dan reformasi birokrasi yang begitu cepat, berdampak pada perubahan organisasi.
2. Perkembangan teknologi berdampak pada tuntutan masyarakat atas pelayanan Publik yang cepat, mudah, murah dan tuntas.

3. Prestasi kerja belum sepenuhnya digunakan dalam pemberian reward and punishment.
4. Refocusing anggaran untuk penanganan virus covid-19.

C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Biro Organisasi di masa mendatang antara lain :

1. Penetapan aktivitas dalam kegiatan yang lebih fleksibel sehingga perubahan kebijakan tidak berdampak terhadap pencapaian kinerja.
2. Perlu lebih intensif dalam mensinergikan kegiatan dengan Perangkat Daerah lain untuk memaksimalkan output kegiatan.
3. Menetapkan Road Map RB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan lampiran Renaksi RB OPD Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman pelaksanaan RB di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Mendorong seluruh unit kerja untuk patuh dalam melaksanakan administrasi dengan Sistem/Aplikasi yang telah ada.
5. Komitmen pimpinan yang lebih besar agar mampu mendorong dan mengubah perilaku PNS agar dapat berubah, keluar dari zona nyaman.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 untuk Biro Organisasi semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Semarang, 22 Februari 2021

Kepala Biro Organisasi


Dr. I. IHWAN SUDRAJAT, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19641104 198903 1 013